

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Daerah dapat menjadi kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya.

Sejak diberikannya hak otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama, pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua, untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien,

efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Selama ini penyusunan APBD seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga

menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Dari laporan tersebut dapat dilakukan analisis mengenai kinerja keuangan APBD. Analisis kinerja keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.

Secara khusus mengenai belanja daerah, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sekretariat Daerah (Setda) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Propinsi NTT. Dari laporan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangannya masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan membengkaknya anggaran untuk belanja tidak langsung seperti terlihat dalam data di bawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013, 2014, dan 2015

No	Tahun Anggaran	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
1.	2013		
a.	Anggaran	853.513.357.725	1.705.086.852.072
b.	Realisasi	755.747.653.365	1.619.918.226.955
c.	Persentase	88,54%	95,00%
2.	2014		
a.	Anggaran	1.090.229.901.356	1.809.053.974.572
b.	Realisasi	955.008.639.251	1.733.924.105.031
c.	Persentase	87,59%	95,84%
3.	2015		
a.	Anggaran	1.452.626.266.028	2.071.352.259.000
b.	Realisasi	1.283.703.880.733	2.044.792.232.932
c.	Persentase	88,37%	98,71%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemprov NTT

Dari laporan ini dapat dilihat bahwa anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada anggaran belanja langsung. Padahal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengamanatkan agar rencana alokasi belanja lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung). Selain itu, dapat dilihat pula bahwa realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini menjadi alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian pada Setda Propinsi NTT untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi Anggaran Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS KINERJA BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Propinsi NTT Tahun 2013-2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui dan Menganalisis Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Propinsi NTT Tahun 2013-2015.”

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.